

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

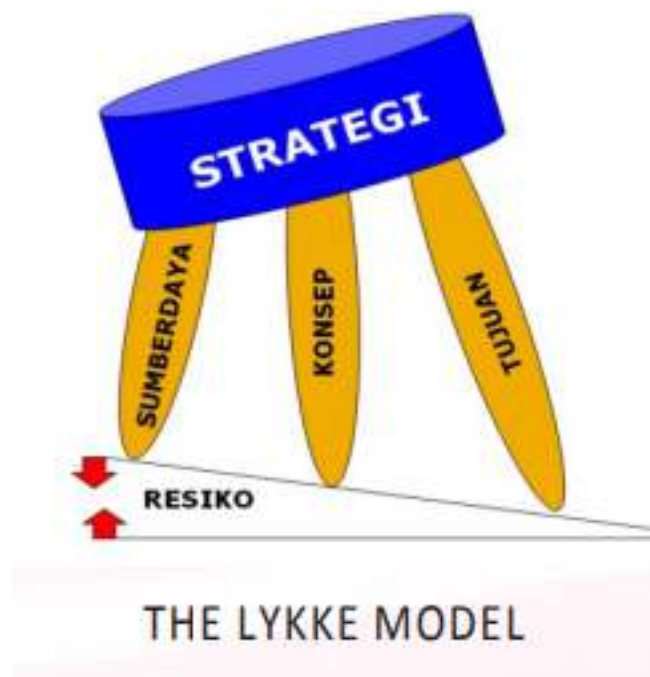
2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Strategi

Pertahanan negara merupakan salah satu tugas pemerintah pusat untuk menjamin keutuhan dan terpeliharanya negara kesatuan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada hakekatnya pertahanan negara Republik Indonesia mencakup segala upaya pertahanan yang bersifat universal, yang dilakukan atas dasar kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016).). Pertahanan negara diatur oleh sistem pertahanan terpadu, yaitu sistem pertahanan semesta, yang mencakup semua bangsa, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, yang diatur sebelumnya oleh pemerintah untuk menopang negara, dan bersifat menyeluruh, terpadu, tepat sasaran dan terus menerus. Kedaulatan, keutuhan wilayah dan keamanan seluruh bangsa dari segala ancaman (Indonesia, 2015).

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan No.26 tahun 2014 menyebutkan bahwa Strategi pertahanan dirumuskan dengan mempertimbangkan tiga unsur dasar yang menyertainya. Pertama, menciptakan (*To Shape*) lingkungan keamanan domestik dan internasional yang dapat melindungi kepentingan nasional dengan mempromosikan stabilitas regional, mengurangi dan menghilangkan ancaman, mencegah konflik, dan mencegah agresi dan tindakan kekerasan lainnya tentang membentuk strategi yang dapat dibuat dan dibentuk. Kedua, Merespon (*To Respond*), yaitu strategi yang dapat merespon berbagai krisis yang dapat menimbulkan ancaman dan risiko terhadap kepentingan nasional. Ketiga, persiapan (*To Prepare*), strategi

yang berkonsentrasi pada membangun kekuatan, mengembangkan konsep, dan menggunakan kemajuan teknologi untuk menyelenggarakan pertahanan yang melindungi kepentingan nasional kita dalam rangka mempersiapkan pertahanan kita untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti.



Sumber : Permenhan RI No.26 Tahun 2016

Gambar 2 :Elemen Starategi Pertahanan RI

Teori strategi Lucke terdiri dari tiga elemen: sarana(*Means*), metode (*Ways*), dan tujuan(*Ends*). Sarana adalah sarana untuk mencapai tujuan. Metode adalah cara untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan adalah tujuan yang ingin dicapai (Lykke, 1989). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan segala sumber daya negara untuk melaksanakan strategi tertentu dalam perang dan damai. (digunakan untuk mempertahankan diri atau mengusir serangan)(*KBBI Daring, 2022*).

Sedangkan Sofyan (2015:4) memberikan kesimpulan dalam satu pengertian, Strategi adalah proses pengambilan keputusan untuk penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam lingkungan organisasi yang terus berubah (Rusli, 2018). Menurut Salusu (2015), strategi adalah seni menggunakan keahlian dan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Ditegaskan juga bahwa setiap unit organisasi memiliki strategi yang dibuat berdasar ruang lingkup kewenangannya.

Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan peperangan itu sendiri kelanjutan dari politik. Wechsler dan Backoff dalam Heene (2010) menekankan bahwa terbuka peluang untuk mengidentifikasi hal-hal yang memungkinkan untuk mengkategorikan penerapan strategi organisasi publik ke dalam empat corak. Mengenai ciri-ciri spesifik dari keempat jenis strategi publik yang telah teridentifikasi oleh Wechsler dan Backoff dalam Heene (2010), dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Strategi Ekspansi Di dalam strategi ekspansi penerapan strategi terutama sekali ditujukan bagi peningkatan status, kapasitas serta sarana-sarana yang berdampak mampu memberi sentuhan warna masa depan keorganisasian yang selaras zaman.
- b. Strategi Transformasi Pada strategi ini ditandai oleh adanya kebutuhan dari organisasi untuk memenuhi tekanan internal ataupun eksternal yang ada pada prinsipnya dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental.
- c. Strategi Isolasi Strategi isolasi yang memiliki ciri adanya penolakan aktif terhadap tekanan eksternal yang tengah dihadapi oleh organisasi. Strategi ini berupaya untuk mengakomodasi tekanan eksternal dengan aspirasinya sendiri dengan catatan keinginan

untuk tetap bisa mandiri secara organisasi dan senantiasa diprioritaskan.

- d. Strategi Politisasi Dalam strategi politisasi mengenal dua perwujudan. Pada perwujudan yang pertama, strategi organisasi ditujukan untuk menciptakan terbentuknya keseimbangan kekuatan yang baru di dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan strategi adalah merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk memanfaatkan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam kondisi lingkungan organisasi yang dilakukan oleh Pemkab Ponorgo (*Means*) dan dengan cara apa(*Ways*) untuk suatu tujuan tertentu(*Ends*).

2.1.2 Teori Peningkatan

Menurut seorang ahli bernama Adi S, (2003: 67) peningkatan berasal dari kata tingkat, yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas, sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Peningkatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1198) adalah menaikkan, mempertinggi, memperhebat. Peningkatan adalah suatu proses untuk merubah ke arah yang lebih baik. Menurut Milan Rianto (2002: 4), perubahan tingkah laku yang terjadi dalam suatu proses menunjukkan bahwa tingkah laku yang terjadi menjadi karakteristik peserta didik baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik, diperoleh secara bertahap melalui praktik atau latihan, pengalaman yang diberi penguatan. Suatu pembelajaran tentu memiliki tujuan yaitu agar materi yang disampaikan bisa dimengerti, difahami dan dilaksanakan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. menurut Hamzah B Uno (2008:13) Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Ponorogo dalam meningkatkan bela negara sehingga dapat lebih familiar dimasyarakat. Bela negara dikatakan meningkat apabila adanya suatu perubahan dalam proses pelaksanaannya.

2.1.3 Teori Bela Negara

Pengertian Bela Negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Kusuma (2018) Model dan Unsur bela negara, dibagi dua, yakni dilakukan secara non-fisik dan fisik

1. Bela negara secara non-fisik dititikberatkan pada tumbuhnya kesadaran untuk menangkal berbagai potensi ancaman baik dari luar maupun dari dalam, misalnya: kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, memajukan bangsa, patuh pada hukum;
2. Bela negara secara fisik, keterlibatan warga negara sipil dalam upaya pertahanan negara dilakukan melalui keterlibatan langsung, lazim disebut sebagai Mobilisasi.

Purnomo Yusgiantoro (2010), Bela Negara adalah sikap perilaku warga Negara yang dijiwai dengan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan Negara. Nilai nilai bela negara yaitu: Cinta tanah air, Kesadaran berbangsa dan bernegara. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Memiliki kemampuan awal bela negara.

2.1.4 Teori Globalisasi

Kata globalisasi berasal dari kata “global” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang memiliki arti “secara keseluruhan”. Sebagaimana dikemukakan oleh Wuryan dan Syaifullah (2013, hlm. 141) bahwa Secara etimologis globalisasi berasal dari kata “globe” yang berarti bola dunia sedangkan akhiran sasi mengandung makna sebuah “proses” atau keadaan yang sedang berjalan atau terjadi saat ini. Jadi secara etimologis, globalisasi mengandung pengertian sebuah proses mendunia yang tengah terjadi saat ini menyangkut berbagai bidang dan aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara-negara di dunia.

Pengertian Globalisasi Menurut Para Ahli Mengutip modul Mata Pelajaran Antropologi (2018):

1. Heywood menjabarkan Globalisasi adalah kemunculan sebuah jaringan saling-ketergantungan yang kompleks yang berarti bahwa kehidupan seseorang semakin dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keputusan-keputusan yang dibuat di sebuah tempat yang jauh dari orang tersebut.
2. Winarno Mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan.
3. Jan Aart Scholte Globalisasi adalah proses meningkatnya interdependensi antara aktor negara dan non-negara pada skala global, sehingga hubungan sosial dalam suatu masyarakat secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi dimensi hubungan sosial yang lebih luas pada skala dunia.
4. Anthony Giddens Globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah

dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya.(Maria Ulfa, 2021)

Hakekat Globalisasi Pada era delapan puluhan globalisasi bukanlah sebuah istilah yang dipakai secara umum. Penggunaannya masih terbatas pada perdebatan-petdebatan dalam ranah bisnis dan beberapa sudut ilmu-ilmu sosial di Eropa. Tetapi kemudian istilah itu meraih status sebagai kata kunci yang mendunia (*worldwide buzzword*) dan menjadi sebuah terminologi yang bernuansa emosional dalam wacana publik. Ada yang memahaminya sebagai suatu masyarakat sipil internasional yang kondusif bagi perkembangan era damai dan proses demokratisasi. Yang lain memahaminya sebagai era ancaman dan hegemoni negara-negara maju secara ekonomi dan militer terhadap negara-negara berkembang dan miskin. Ada juga yang melihat globalisasi sebagai sebuah konsekuensi kultural dan proses homogenisasi dunia akibat kemajuan infrastruktur transportasi dan jaringan komunikasi masa(Tampake, 2018)

Dampak-dampak dari globalisasi Mudahnya informasi yang masuk dari berbagai negara tentu membawa dampak baik serta buruk. Dampak-dampak tersebut diantaranya(Septiana, 2021), dampak positif globalisasi yaitu sebagai berikut :

1. Dapat memperoleh kebutuhan hidup yang lebih bervariasi dan murah.
2. Berbagai informasi bermanfaat bisa didapat dengan cepat karena sudah terhubung dengan jaringan data pusat.
3. Pembangunan infrastruktur dan suprastruktur semakin pesat. Penegakan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan kedewasaan demokrasi politik semakin meningkat
4. Kesejahteraan hidup masyarakat semakin baik karena ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat. Wawasan

menjadi lebih luas karena mampu memahami dan menangani permasalahan yang beragam.

5. Hubungan antar negara di sektor ekonomi semakin meningkat. Kualitas produksi meningkat agar bisa bersaing di pasar internasional
6. Meningkatkan kepribadian, sikap hidup, pola pikir, disiplin, dan etos kerja yang berdampak pada peningkatan kualitas kerja dan individu.

Akan Tetapi seperti dua mata koin globalisasi juga memiliki Dampak negatif hal itu dijelaskan sebagai berikut :

1. Kesenjangan kepemilikan modal yang mengakibatkan kesenjangan sosial-ekonomi yang akan mendorong terjadinya kapitalisme di dunia ekonomi.
2. Pembangunan tidak merata antara daerah maju dengan daerah terpencil
3. Terbentuknya jaringan global dimana poros kendali terdapat di negara dengan kekuatan ekonomi raksasa. Hal ini menyebabkan ketergantungan negara miskin
4. Budaya luhur bangsa memudar bahkan hilang akibat pengaruh budaya asing yang masuk.
5. Masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara sehingga membuat hubungan antar masyarakat terganggu
6. Meningkatkan liberalisme, individualistis, materialisme, dan permasalahan sosial lainnya yang mengancam kebudayaan dan nilai sosial.
7. Tindak kriminalitas menjadi lebih beragam akibat pengaruh film dan tontonan dari negara asing.
8. Penyakit sosial seperti penyalahgunaan narkoba hingga pornografi juga meningkat.

9. Lingkungan dan SDA yang terganggu kualitasnya akibat industri yang berkembang pesat dan eksplorasi tanpa kendali.

Dari penjelasan teori mengenai tantangan globalisasi harus ditanggapi serius karena hal itu dapat berdampak pada kelangsungan suatu bangsa, jika salah dalam menentukan kebijakan terlebih lagi kebijakan pertahanan, akan mengakibatkan suatu indikator yang menurun terhadap integrasi terhadap bangsa dan negara, oleh sebab itu tantangan di era globalisasi ini harus dibarengi dengan pemupukan dan peningkatan bela negara terlebih Pemda Ponorogo harus menyiapkan sumber daya di wilayahnya untuk mencegah ancaman yang timbul dari masyarakatnya.

2.1.5 Teori Perkuatan

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional yang merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Sudirman & Fadly, 2018). Pertahanan Nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau di luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan nasional hidup (Aris Kurniawan, 2022). Behavioristik Teori ini menekankan proses belajar serta peranan lingkungan yang merupakan kondisi silang dalam menjelaskan tingkahlaku. Menurut teori ini, semua bentuk tingkahlaku manusia merupakan hasil belajar melalui proses perkuatan. Lingkunganlah yang akan menentukan arah perkembangan tingkahlaku manusia lewat proses belajar. Perkembangan manusia dapat dikendalikan ke arah tertentu sebagaimana ditentukan oleh lingkungan dengan kiat-kiat rekayasa yang bersifat impersonal dan direktif

Berbagai cara dapat dilakukan baik fisik maupun non fisik dengan mempengaruhi, menekan ataupun memaksa kehendaknya pada Negara kita. Demikian juga jumlah penduduk Indonesia yang besar, dapat menjadi

keuntungan karena dapat menjadi potensi bagi kekuatan pertahanan negara. Disisi lain jumlah penduduk yang besar dapat menjadi ancaman bila penduduk tidak diberdayakan dengan baik, untuk pertahanan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang keikutsertaan warga Negara didalam upaya pertahanan Negara yang diatur dalam pasal sbb :

1. Pasal 27 ayat (3) mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
2. Pasal 30 ayat (1) mengatur bahwa tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pada pasal 1 ayat 2 yaitu mengatur bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah dan sumberdaya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Maka dari itu teori perkuatan dapat diartikan perkuatan pertahanan melalui peningkatan Bela Negara bagi masyarakat Indonesia agar semua warga Indonesia bangga dan cinta terhadap tanah airnya terutama untuk menggelorakan rasa nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan antar warga negara terkhusus yang berada di wilayah Ponorogo

2.1.6 Teori Partisipasi

Wujud nyata keterlibatan masyarakat dalam Bela Negara yaitu hadirnya relawan yang menjadikan *puzzle good governance* menjadi lebih

baik. Kajian tentang tata kelola bencana di Indonesia bahkan dunia, tidak terlepas dari relawan (Supriyati, 2020). Partisipasi masyarakat tidak terlepas dari modal sosial. Nilai-nilai yang masih tertanam dengan kuat pada masyarakat seperti nilai gotong royong dan kekerabatan membuat ikatan sosial semakin kuat, sehingga lebih mudah dalam memobilisasi massa (Kustiningsih dan Nurhadi, 2020).

Secara umum partisipasi masyarakat didefinisikan oleh Abbott (1995), Asnarulkhadi dan Aref (2011), dan Hung et al. (2010) dari dua perspektif yaitu partisipasi sebagai sarana dan partisipasi sebagai tujuan. Sebagai sarana, anggota masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan tetapi ditentukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang mungkin tidak sejalan dengan keinginan mereka (Asnarulkhadi dan Aref, 2011). Partisipasi ini juga dianggap statis dan pasif karena mereka diminta dan didorong untuk berpartisipasi dalam program oleh otoritas seperti instansi pemerintah atau badan lainnya. Tingkat efisiensi dan efektivitas partisipasi sebagai sarana diidentifikasi dengan melihat hasil kegiatan atau program pengembangan masyarakat. Partisipasi model ini, partisipasi masyarakat tidak berjalan efektif sejak pemerintah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan.

Adapun sebagai tujuan, partisipasi mengacu pada keterlibatan langsung anggota masyarakat dalam proses menentukan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Hal ini juga dianggap sebagai proses yang membantu untuk mengembangkan kapasitas atau kemampuan anggota masyarakat, mengidentifikasi dan meningkatkan potensi mereka. Partisipasi ini juga memberikan kesempatan untuk mempengaruhi dan berbagi kekuasaan secara kolektif, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan mendapatkan kontrol atas hidup mereka (Asnarulkhadi dan Aref, 2011; Nikkhah, 2010). Bentuk partisipasi ini merupakan responsif terhadap kebutuhan lokal dan lingkungan. Partisipasi ini pandangan Moser (1989) menggunakan pendekatan *bottom-up*.

Secara harfiah, Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation* yang berarti peran serta atau kegiatan bersama-sama orang lain. Beberapa pandangan pengertian partisipasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. WHO (2002), partisipasi masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penentuan isu dan masalah dan agen efektif kehidupan mereka serta mereka dapat terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan, memberikan layanan dan proses perubahan olehnya.
- b. Mawardi dan Sulaeman (2011), mendefinisikan partisipasi adalah keterlibatan orang atau sekelompok orang dalam menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki berupa mental, emosi, serta fisik dalam rangka mendukung kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki tanggung jawab atas keterlibatan tersebut (p.15).
- c. Partisipasi adalah suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan orang atau sekelompok orang tanpa paksaan dan aktif dalam seluruh proses kegiatan. Keterlibatan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil (Mardikanto dan Soebiato, 2013 p. 82).
- d. Partisipasi masyarakat adalah hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka menentukan keputusan pada semua tahapan proses pembangunan, dimulai dengan perencanaan awal lingkungan, pelaksanaan, pemantauan dan konservasi. Pada proses ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat peralatan dan kelebihan, tetapi juga objek pembangunan berkelanjutan (Dewi, Fandeli, dan Baiquni, 2013).
- e. Handayani (2011), berpendapat bahwa partisipasi adalah partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses kegiatan sebagai sarana untuk mempererat kohesi antar masyarakat dan

juga untuk mendorong tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program-program yang dilaksanakan (p. 21).

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli, dapat disintesis bahwa partisipasi masyarakat yaitu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dan terlibat secara mental, pikiran, emosi maupun fisik baik secara individu maupun perwakilan dalam proses pembangunan dan bertanggung jawab terhadap usaha tersebut.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah (2008) dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Partisipasi harta benda;
- b. Partisipasi keterampilan dan kemahiran;
- c. Partisipasi buah pikiran;
- d. Partisipasi sosial; dan
- e. Partisipasi tenaga (p.102).

Partisipasi dalam masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dilihat dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap asesmen. Dalam proses ini, dilakukan pengkajian terhadap masalah, sumber daya yang dimiliki dengan melibatkan masyarakat, karena masyarakat yang mengetahui kapasitas dan kerawanan mereka sendiri.
- b. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Adapun dalam tahapan ini yaitu melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi dengan melibatkan masyarakat.
- c. Tahap implementasi. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan berupa program-program yang sudah direncanakan dengan baik sehingga menjadi tahap yang paling krusial.
- d. Tahap evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah terhadap implementasi kegiatan yang ditetapkan. Evaluasi tersebut berupa input, proses, dan hasil (Rukminto, 2010, p. 252).

Selain itu, partisipasi masyarakat memiliki tingkatan (level) partisipasi. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat terdapat delapan tingkatan yang selanjutnya dideskripsikan secara kontinum dari tidak ada kekuatan (*nonparticipation*), ke partisipasi semu (*tokenism*), ke tingkat partisipasi warga negara yang sebenarnya (*degrees of citizen power*). Level partisipasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Level Partisipasi Masyarakat

Sumber: Arnstein, 1969

- a. *Manipulation* (menipu). Anak tangga ini merupakan level partisipasi yang terendah, oleh karena itu disebut juga nonpartisipasi. Level partisipasi ini mengandung makna bahwa publik dan pengamat “dimanipulasi” untuk menganggap bahwa partisipasi publik sedang berlangsung. Level partisipasi ini dapat

dilihat dengan pertemuan yang diadakan oleh otoritas setempat yang mana pejabat mempengaruhi warga, bukan sebaliknya.

- b. *Therapy* (pemulihan). Pada level partisipasi ini, menempatkan masyarakat untuk bekerja mengubah diri mereka sendiri daripada memberikan saran kepada otoritas yang berwenang. Arnstein mencontohkan seorang ayah yang membawa anaknya ke rumah sakit, tetapi tidak diberikan pelayanan dengan baik oleh rumah sakit tersebut, yang kemudian mengadu pada otoritas yang berwenang. Alih-alih rumah sakit tersebut menegur agar tidak terjadi kejadian tersebut dikemudian hari, malah justru membiarkan aduan tersebut.
- c. *Informing* (memberi Informasi). Menginformasikan dan menciptakan kesadaran merupakan tindakan yang sangat krusial ke arah partisipasi publik, tanpa hal tersebut partisipasi publik tidak dapat terjadi. Informasi yang diberikan harus dilakukan dua arah, karena masyarakat akar rumput lebih mengetahui permasalahan mereka sendiri. Hal tersebut dikarenakan apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi yang tepat, maka partisipasi masyarakat tidak akan terwujud.
- d. *Consultation* (konsultasi). Untuk menggambarkan level ini yaitu dengan melihat otoritas yang berwenang menerima saran dan pendapat dari masyarakat.
- e. *Placation* (mendiamkan). Pada level ini, sebenarnya masyarakat sudah memiliki pengaruh, walaupun jauh dari optimal. Otoritas yang berwenang menerima saran dan kritik dari masyarakat, akan tetapi otoritas yang berwenang tetap menjalankan program yang telah direncanakan. Masyarakat dapat memberikan kritik dan pendapat bahkan merencanakan banyak hal, tetapi pemegang kekuasaanlah yang akhirnya memutuskan apakah akan mempertimbangkan ide-ide tersebut atau tidak.

- f. *Partnership* (kerja sama). Pada level ini antara masyarakat dan otoritas yang berwenang melakukan kerja sama. Level ini memungkinkan kekuasaan dibagi melalui negoisasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Tugas perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan pemerintah, misalnya dewan kebijakan bersama, komite perencanaan, dan mekanisme lain yang terdapat kerja sama.
- g. *Delegated Power* (pembagian kekuasaan). Dalam level ini, publik mempunyai kewenangan menentukan keputusan yang besar dalam suatu program. Level ini membutuhkan masyarakat yang memiliki dedikasi tinggi. Ketika keputusan tidak dapat dibuat melalui negosiasi antar kelompok, masyarakat dan pemegang kekuasaan seringkali memiliki hak untuk melakukan *voting*. Seseorang dapat menggambarkan tingkat partisipasi ini sebagai tingkat kerjasama yang sangat tinggi di mana warga negara diberikan banyak wewenang.
- h. *Citizen Control* (kontrol masyarakat). Level ini merupakan level yang tertinggi dalam partisipasi publik, hanya saja tidak ada yang memiliki kontrol absolut, termasuk masyarakat. Masyarakat bertanggung jawab penuh atas kebijakan dan rencana mereka. Kontrol masyarakat sangat kuat, bahkan mampu untuk mengevaluasi kinerja pemerintah (p. 216-224)

Dengan kata lain, Partisipasi Masyarakat dapat diartikan sarana menunjukan sikap, pertemuan lingkungan dan audiensi publik. Masyarakat ikut dalam kegiatan yang bermanfaat seperti konsultasi dan pengembangan berjalanya pemerintahan dapat dilakukan bersama sama dan adanya timbal balik antar Pemerintah dan masyarakat sehingga terlaksananya Bela Negara secara keseluruhan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini agar mendapatkan referensi yang mendukung, sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu guna melihat tingkat kebaruan, kesamaan, dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya terkait peningkatan bela negara dalam rangka menghadapi era globalisasi guna memperkuat pertahanan negara . Penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Sri Indriyani Umra (2019) yang berjudul “Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara” bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep bela negara di Indonesia, bagaimanakah kelebihan dan kerugian penerapan bela negara di Indonesia saat ini. Metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Setelah dilakukan pengkajian diketahui bahwa konsep bela negara yang lebih menitikberatkan pada pemahaman nilai-nilai luhur pancasila terkait dengan karakter atau perilaku dan penulis melihat kajian ini dalam dua sudut pandang yang berbeda dituangkan dalam bentuk kebijakan penerapan bela negara dengan bersandar pada peraturan perundangundangan melalui kebijakan tentang bela negara. Pada hakikinya penerapan program pelatihan bela negara disesuaikan dengan tuntunan zaman saat ini dalam pelaksanaan bela negara di Indonesia(Umra, 2019).

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh (Indrawan & Efriza, 2018)dengan judul Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir- Militer”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi pustaka disertai wawancara dan bertujuan untuk mengetahui suatu Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan

Tantangan (AGHT) Indonesia di masa depan yang bersifat bersifat nir-militer (non-konvensional). Hasilnya Paradigma pertahanan Indonesia jika hanya mengandalkan TNI sebagai kekuatan utama sudah seharusnya berubah. Berkurang jika dilihat dari ancaman militer (konvensional) dari negara lain terhadap Indonesia, maupun ancaman sejenis di seluruh dunia, membuat kita harus berpikir ulang bagaimana rumusan yang paling tepat untuk strategi pertahanan Indonesia di era ancaman nir-militer seperti ini. Untuk itu, pembentukan komponen cadangan, yang sebelumnya sudah dilengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan mumpuni tentang bela negara, perlu dipertimbangkan. Pertimbangannya adalah, pembentukan komponen cadangan ini dapat berguna sebagai elemen kekuatan pertahanan pendukung komponen utama, utamanya untuk menghadapi ancaman nir-militer. Penggunaan komponen cadangan tidak hanya dipersiapkan untuk perang, tetapi mempunyai fungsi utama membantu TNI menghadapi AGHT yang bersifat non-fisik (intangible).

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh (Samego, 2015), Yang Berjudul "Kontekstualisasi 'Sishaneg': Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Perspektif Perubahan". Bertujuan untuk meneliti bagaimana pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga Negara untuk

hidup setara, adil, aman, damai dan sejahtera, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasilnya yaitu, bahwa postur pertahanan kita semakin lama semakin memprihatinkan. Jangankan dapat kembali ke era 1960an di mana Indonesia sangat disegani di kawasan asia, sekedar untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga, Malaysia dan Singapura saja masih belum tercapai.

Keempat penelitian yang dilaksanakan oleh (Tampake, 2018) yang berjudul “Tantangan Globalisasi terhadap Nilai-nilai Keindonesiaan” bertujuan mencari tau bagaimanapun pengaruh era globalisasi yang menghadirkan tantangan-tantangan baru terhadap situasi pewujudan cita-cita dan nilai-nilai keindonesiaan. Bagaimana melakukan internalisasi nilai-nilai keindonesiaan di dalam rangka membangun karakter bangsa? Bagaimana mengatasi persoalan-persoalan seperti kemiskinan struktural, integrasi dan kohesi sosial, identitas dan kolaborasi kultural, toleransi dan kerukunan antara masyarakat?. Metode pengumpulan data dengan studi fakta fakta yang ada di lapangan dan disinkronkan dengan data sekunder yang telah ada. Dan hasilnya pada zaman dulu keindonesiaan ditantang oleh sistem kolonialisme dan imperialisme Barat maka sekarang keindonesiaan ditantang oleh globalisasi ekonomi dan ekspansi budaya domina, hal itu sellaras dengan studi kasus yang telah dilakukan oleh John Titaley sebagai dominasi ekonomi dan kultural yang sedang mengancam Indonesia. Menurutnya Indonesia secara militer dan politik telah merdeka, tetapi di bidang ekonomi dan budaya Indonesia masih belum dapat melepaskan diri dari imperialisme bangsa-bangsa lain yang kuat.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh (Budiwibowo, 2016) yang berjudul ” Revitalisasi Pancasila Dan Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural” yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah revitalisasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam menghadapi arus

globalisasi?. Bagaimana Pancasila diimplementasikan sebagai model pendidikan karakter, bela negara yang multikultural?. Dan kesimpulan yang didapat dari studi kasus yang menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu Globalisasi yang didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, telah merubah pola hubungan antar bangsa dalam berbagai aspek. Negara seolah tanpa batas (*borderless*), saling tergantung (*interdependency*) dan saling terhubung (*interconnected*) antara satu negara dengan negara lainnya. Saat ini, tidak ada satupun negara di dunia yang mampu berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan warganya. Bela negara adalah membela kepentingan nasional pada seluruh aspek kehidupan nasional. Bela negara tidak hanya berhubungan dengan kepentingan militer semata tetapi kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga negara bisa melakukannya baik secara fisik maupun non fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara, pembelaan negara secara non fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses nasionalisme. Peningkatan.

Keenam penelitian yang dilakukan oleh (Siswanto, 2017) yang berjudul "Loving The Domestic Product As A Manifestation Of Defend The State In The Global Era" yang bertujuan melihat fakta perubahan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia di era Reformasi dan global. Termasuk perubahan dalam konteks bela negara dimana pada masa sebelumnya bela negara dipahami hanya sebagai kegiatan bersifat militer. Konsep bela negara saat ini memiliki makna yang lebih luas yaitu dalam konteks ekonomi, sosial, dan kultural. Penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan studi pustaka yaitu mempelajari referensi atau kajian-kajian sebelumnya terkait dengan isu bela negara, dan diskusi mendalam dengan narasumber yang relevan. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi atau meningkatkan pemahaman atas topic bela negara. Hasil dari kajian

ini adalah berupa kesimpulan dan rekomendasi untuk membangun pola konsumsi masyarakat agar lebih memilih produk nasional ketimbang produk luar negeri.

Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh (Rusfiana, 2021) yang berjudul “Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) Dan Dinamika Potensi Ancaman” yang bertujuan untuk melihat perkembangan lingkungan strategis yang dapat melahirkan sifat ancaman yang tidak hanya ancaman militer, tetapi juga non militer. Studi kasus penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang lebih mengutamakan studi pustaka dan diskusi pakar sehingga diharapkan perkembangan lingkungan strategis yang dapat melahirkan sifat ancaman yang tidak hanya ancaman militer, tetapi juga non militer. Ancaman tidak hanya tradisional tetapi juga non tradisional. Pembentukan komponen cadangan (komcad) sebagai elemen kekuatan pertahanan non-militer, difungsikan membantu komponen utama (komput) pertahanan negara (TNI). Komponen cadangan adalah solusi untuk menghadapi potensi ancaman militer pada konteks perang generasi kelima bahkan ke enam yang bersifat nir-militer. Selanjutnya Bela negara dalam hal ini berguna sebagai materi ajar utama yang diberikan kepada anggota komponen cadangan pertahanan negara sehingga melalui upaya ini Sishanta sebagai sistem pertahanan negara dapat di aktualisasikan. Karena keterlibatan warga negara dalam usaha bela negara menjadi bagian dari tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab itu secara tersirat dimandatkan oleh konstitusi, maupun Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dengan maksud tujuan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Kedelapan penelitian yang dilakukan oleh (Tobing, 2015) yang berjudul “Sistem Keamanan Nasional pada Indeks Persepsi Ancama” Penelitian ini berfokus pada lima variabel persepsi ancaman, dalam proses pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kuantitatif dengan indeks persepsi ancaman dan metode proses hirarki analitik. Variabel indeks persepsi ancaman: perubahan pemetaan kekuatan global, lingkungan strategis dengan ambiguitas tinggi, sistem politik dalam negeri, domestik dan pelanggaran norma sosial budaya.

Kesembilan penelitian yang dilakukan oleh (Luh De Liska, 2017) yang berjudul “Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa”. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2013) yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa- apa yang saat ini berlaku, dengan mengkaji hubungan antara implementasi nilai-nilai pancasila dalam penguatan karakter bangsa. Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan data studi kepustakaan, dengan cara penelusuran terhadap semua bahan yang sejalan dengan permasalahan penulisan ini, dengan mengkaji hasil penelitian, mengutip mencatat buku-buku, menelaah teori teori yang berkaitan dengan permasalahan. Kehidupan bangsa Indonesia memerlukan adanya implementasi nilai- nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Itu agar nilai norma dan etika yang terkandung di dalam Pancasila, benar-benar menjadi bagian yang utuh dan dapat menyatu dengan kepribadian setiap manusia Indonesia. Sehingga, dapat membentuk pola sikap, pola pikir dan pola tindak serta memberi arah kepada masyarakat Indonesia

Kesepuluh penelitian yang dilakukan oleh (Widiyanto & Istiqomah, 2019) yang berjudul “Peningkatan Kesadaran Bela Negara Melalui Budaya Sekolah”. Metode penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data. Tujuan artikel ini adalah memberikan analisis teoritik bahwa peningkatan kesadaran bela negara dapat dilakukan melalui budaya sekolah. Kesadaran bela negara menjadi bagian dari upaya yang dilakukan dalam rangka bentuk bela negara.

2.2.1 Matrik Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Indriyani Umra (2019)	Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan bela Negara perlu dievaluasi secara terencana, sistematis sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang semestinya. • pelaksanaan bela negara adalah untuk menjaga dan meningkatkan jiwa dan karakter anak bangsa yang cinta akan tanah air serta tidak menghilangkan identitas bangsa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup penelitian pada Peran lembaga • Pelibatan masyarakat secara luas yaitu warag Negara Indonesia • Penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilaksanakan dengan subjek konsep bela negara secara militer • Lebih diarahkan kepada penggunaan potensi militer

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2	(Indrawan & Efriza, 2018)	Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer”	<ul style="list-style-type: none"> • pembentukan komponen cadangan ini dapat berguna sebagai elemen kekuatan pertahanan pendukung komponen utama. • Penggunaan komponen cadangan tidak hanya dipersiapkan untuk perang, tetapi mempunyai fungsi utama membantu TNI menghadapi AGHT yang bersifat non-fisik (<i>intangible</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup penelitian pada peran komponen cadangan • Pemanfaatan potensi sumberdaya manusia sebagai pertahanan keamanan nasional dengan pembekalan kemampuan bela negara • Penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilaksanakan berfokus pada komponen cadangan • Pemanfaatan sumber daya komponen cadangan guna mengangkal bahaya ancaman di sektor nir militer

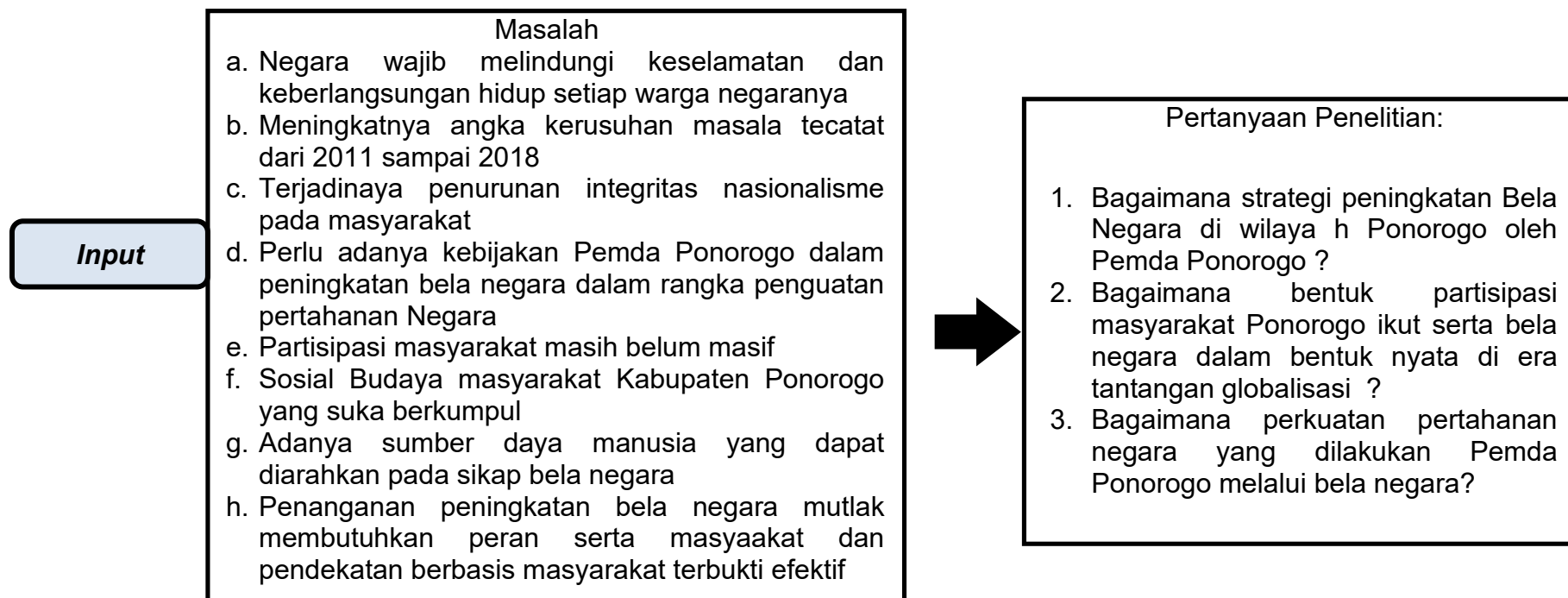
3	(Samego, 2015) ,	Kontekstualisasi 'Sishaneg': dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Perspektif Perubahan”	Hasil penelitiannya yaitu sistem pertahanan Indonesia semakin mereduksi jika di bandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup penelitian pada PeranKementrian Pertahanan • Pemanfaatan pada sistem pertahanan modern • Penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilasanakan di laksanakan di Kementrian Pertahanan • Pemanfaata n ptensi pandangan masyarakat pada sistem pertahanan yang berwawasan pada idiologi Pancasila dan UUD 1945
4	(Tampake, 2018)	“Tantangan Globalisasi terhadap Nilai-nilai Keindonesiaan	• Indonesia secara militer dan politik telah merdeka, tetapi di bidang ekonomi dan budaya Indonesia masih belum dapat melepaskan diri dari imperialisme bangsa-bangsa lain yang kuat.	• pengaruh era globalisasi yang menghadirkan tantangan-tantangan baru terhadap situasi pewujudan cita-cita dan nilai-nilai keindonesiaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilaksanakan di Balikpapan • Pengamanan obyek nilai nilai nasional

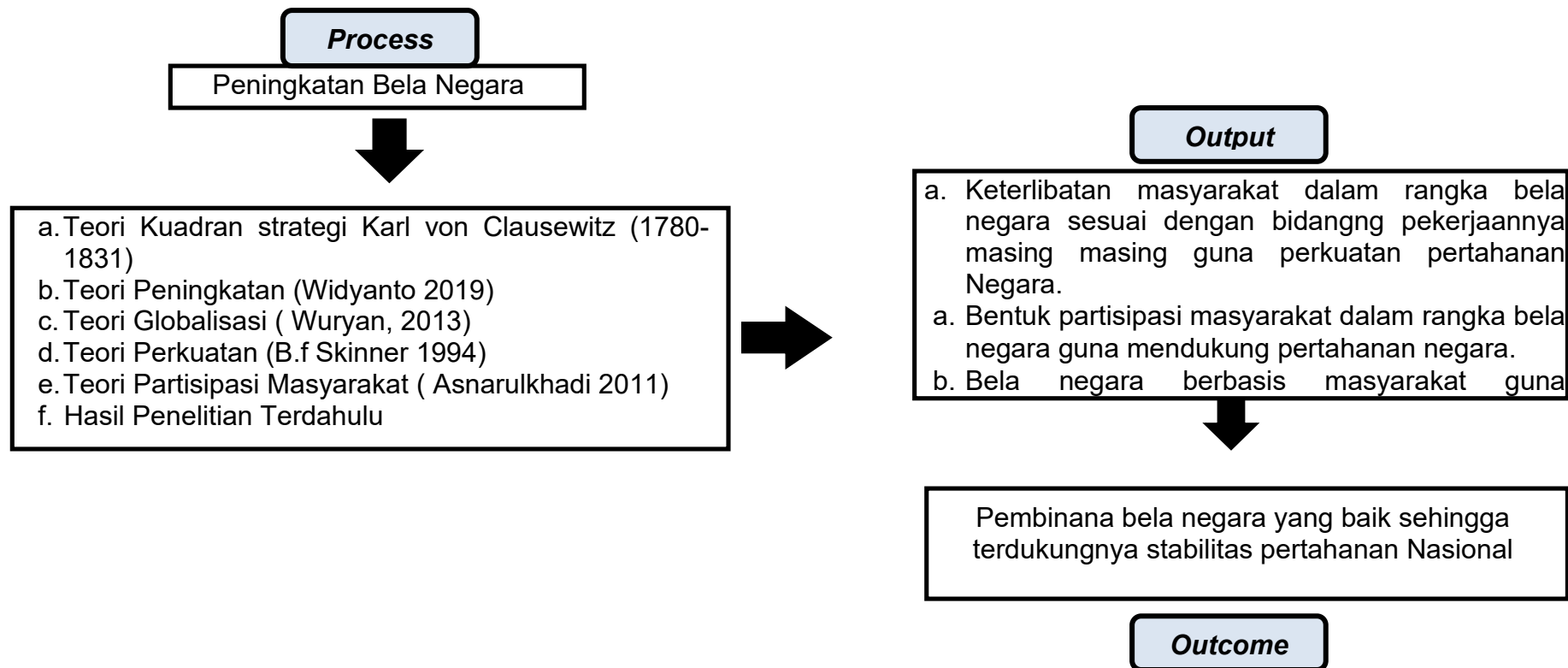
5	(Budiwibowo, 2016)	Revitalisasi Pancasila Dan Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural	<ul style="list-style-type: none"> • kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, telah merubah pola hubungan antar bangsa dalam berbagai .aspek. Negara seolah tanpa batas (<i>borderless</i>), saling tergantung (<i>interdependency</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penekanan pada ideologi bangsa sebagai cara pandangan pertahanan Negara • Peningkatan Bela Negara penting dilakukan sejak dini 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Bela Negara melalui kultural daerah masing masing • Berfokus pada kultur budaya
6	(Siswanto, 2017)	Loving The Domestic Product As A Manifestation Of Defend The State In The Global Era	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu wujud bela Negara yaitu dengan mencintai produk dalam negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Penekanan pada wujud nyata bela negara • Menjadikan bela negara dengan berbagai cara sesuai bidang masing masing 	<ul style="list-style-type: none"> • Subjek yang ditekankan pada kecintaan dan wujud penggunaan produk dalam negeri sebagai sarana bela negara
7	Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh (Rusfiana, 2021)	Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) Dan Dinamika Potensi Ancaman	<ul style="list-style-type: none"> • sistem pertahanan negara dapat di aktualisasikan. Karena keterlibatan warga negara dalam usaha bela negara menjadi bagian tanggung jawab bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan masyarakat dalam upaya pertahanan negara • Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih berfokus kepada kekuatan TNI AD dan Komponen cadangan • Bela negara sebagai jalan alternatif untuk pertahanan

8	(Tobing, 2015)	“Sistem Keamanan Nasional pada Indeks Persepsi Ancama”	<ul style="list-style-type: none"> • sistem politik dalam negeri, domestik dan sosial budaya dari sinyal kritis pelanggaran norma yang berasal dari proses hirarki analitik dapat digunakan sebagai dasar pembentukan sistem keamanan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeteksi adanya bahaya ancaman pada pertahanan Indonesia yang bersifat modern • Sistem pengambilan keputusan strategis dalam kepentingan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode kuantitatif • Menekankan pengambilan
9	(Luh De Liska, 2017)	Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai nilai idiologi Pancasila membentuk pola sikap, pola pikir dan pola tindak serta memberi arah kepada masyarakat Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode kualitatif deskriptif • Mengacu pada penguatan karakter bangsa yang bersumber pada nilai nilai Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> • Subjek yang masih luas dan tidak spesifik • Menggunakan metode kajian pustaka sebagai data utamanya
10	(Widiyanto & Istiqomah, 2019)	Peningkatan Kesadaran Bela Negara Melalui Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran bela negara harus dilakukan sejak dini dikarenakan pada usia pertumbuhan anak cenderung pada masa pembelajaran yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penekanan pada peningkatan kesadaran bela negara sejak dini • Menggunakan studi kasus dan metode kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Subjek yang diteliti pada budaya sekolah • Menekankan hanya di lingkup usia tertentu

2.3 Kerangka Pemikiran

Kesadaran bela negara tidak terlepas dari rasa Nasionalisme, Nasionalisme adalah sikap politik masyarakat yang memiliki kesamaan wilayah, budaya, bahasa, ideologi, nasib, cita-cita dan tujuan, kemudian mengrucut menjadi paham kebangsaan (Kementerian Pertahanan RI, 2016). Strategi pertahanan negara yang dapat menjamin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini yang dicanangkan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Undang-undang no.23 tahun 2019 adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan sistematika perumusan kerangka pemikiran sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3 berikut :





Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

Sumber: dikelola oleh peneliti, 2022